

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)****Status Verifikasi Administratif Lengkap****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)****UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MADIK**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
3. NHK : **1000331**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.250.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/119 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 35.000 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 22.040 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/120 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS 1.5 R M/T (ADVENTURE) Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA CB150R Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 104.600.000****D. SURAT BERHARGA Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.653.182**



## F. HARTA LAINNYA

Rp. 152.846.830

## Sub Total

Rp. 1.680.100.012

## III. HUTANG

Rp. 1.089.498.556

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 590.601.456

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.